



**PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM**
(005.04.402283)

LAPORAN KEUANGAN

INTERIM

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023



(0734) 7420107

https://www.pa_muaraenim.go.id

Jalan Mayor Jend. Tjik Agus Klemas
SH., Kepur



LAPORAN KEUANGAN INTERIM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

Telepon (0734)7420107, Faksimili (0734)7420108

Website: www.pa-muaraenim.go.id, e-mail: pamuaraenim@ymail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagian sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Muara Enim, 30 Juni 2023

Sekretaris,



Hendri Suryana, S.Ag
NIP. 197405312001121002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Pernyataan Tanggung Jawab | iii |
| Ringkasan | 1 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 3 |
| II. Neraca | 4 |
| III. Laporan Operasional | 5 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 6 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 7 |
| A. Penjelasan Umum | 7 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | 19 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | 22 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | 23 |
| E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 25 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 26 |
| VI. Lampiran | |

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, PALI DAN KOTA PRABUMULIH
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muara Enim, 30 Juni 2023

Sekretaris



Hendri Suryana, S.Ag
NIP. 197405312001121002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 66.234.500,00 atau mencapai 60,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 93,800,000,00 atau mencapai 66,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 142,320,000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 106.346.175,00 yang terdiri dari :
Aset Lancar sebesar Rp 106.346.175,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. Rp 106.346.175,00

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari operasi, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 66.234.500,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 94,707,900,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.28.473.400,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp. (28.473,400,00) sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar (28.473,400,00).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas semester/tahun pelaporan dibandingkan dengan semester/tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 4.732.900,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp. (Rp.28.473.400,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,00 (nihil) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 31.235,275,00 terdapat penurunan ekuitas sebesar (Rp.2.761.875,00) sehingga ekuitas akhir entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp.7.494.775

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Laporan Realisasi Anggaran**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 Juni 2023 DAN 2022*(dalam Rupiah)*

| URAIAN | CATATAN | TA 2023 | | % terhadap Anggaran | TA 2022 |
|-------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | 110.656.000 | 66.234.500,00 | 59,86 | 59.650.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 110.656.000,00 | 66.234.500,00 | 59,86 | 59.650.000,00 |
| BELANJA | B.2. | | | | |
| Belanja Operasi | | | | | |
| Belanja Barang | B.3 | 142.320.000,00 | 93.800.000,00 | 65,91 | 77.398.002,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | | 142.320.000,00 | 93.800.000,00 | 65,91 | 77.398.002,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 142.320.000,00 | 93.800.000,00 | 65,91 | 77.398.002,00 |

NERACA

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NERACA

PER 30 Juni 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

| URAIAN | CATATAN | 30 Juni 2023 | 31 Desember 2022 |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | 7.000.000,00 | 0,00 |
| Kas lainnya dan setara as | | 91.851.400,00 | |
| Persediaan | | 7.494.775,00 | 4.732.900,00 |
| JUMLAH ASET | | 106.346.175,00 | 4.732.900,00 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | | 91.851.400,00 | 0,00 |
| Utang yang belum ditagihkan | | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka dari KPPN | | 7.000.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 98.851.400,00 | 0,00 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | | 7.494.775 | 4.732.900 |
| JUMLAH EKUITAS | | 7.494.775 | 4.732.900 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 7.494.775 | 4.732.900 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 106.346.175,00 | 4.732.900,00 |

(dalam
Rupiah)

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 Juni 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2023 | 2022 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1 | 66.234.500,00 | 59.650.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 66.234.500,00 | 59.650.000,00 |
| BEBAN | | | |
| Beban Persediaan | D.2 | 1.907.900,00 | 2.556.400,00 |
| Beban Barang dan Jasa | D.3 | 27.650.000,00 | 27.020.000,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.4 | 65.150.000,00 | 52.314.002,00 |
| JUMLAH BEBAN | | 94.707.900,00 | 81.890.402,00 |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (28.473.400,00) | (22.240.402,00) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | | 0 | 0 |
| SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | D.5 | 0 | 0 |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 0 | 0 |
| Jumlah surplus/Defisit dari kegiatan Non operasional | | 0 | 0 |
| surplus/defisit sebelum pos Luar biasa | | (28.473.400) | (22.240.402) |
| POS LUAR BIASA | | 0 | 0 |
| SURPLUS/ (DEFISIT) - LO | | (28.473.400,00) | (22.240.402,00) |

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 Juni 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 4.732.900 | 3.112.800 |
| SURPLUS/ (DEFISIT) - LO | E.2 | (28.473.400,00) | (22.240.402,00) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI | | | 0,00 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.3 | 31.235.275,00 | 17.748.002,00 |
| KENAIKAN/ (PENURUNAN) EKUITAS | | 2.761.875 | 4.492.400 |
| EKUITAS AKHIR | E.4 | 7.494.775 | (1.379.600) |

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Entitas
dan Rencana Strategis

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- n. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Muara Enim

Visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Muara Enim sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Muara Enim adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”
Misi Pengadilan Agama Muara Enim adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Muara Enim melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim.
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pengadilan Tingkat Pertama kelas I B Peningkatan kelas tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017, dengan wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). sedangkan wilayah hukum Prabumulih sudah terpisah dengan berdirinya Pengadilan Agama Prabumulih sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016. Sifat operasi pengadilan Agama Muara Enim adalah pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan, sedangkan kegiatan pokok Pengadilan Agama Muara Enim adalah menerima, mengadili, dan memutus perkara yang diterima.

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional Pengadilan Agama Muara Enim, adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi instansi Berbasis Akrual (SAiBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Muara Enim menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Muara Enim dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Perubahan Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah).

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah

Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | <ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN. | 100% |

Penyusutan Aset
Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah.
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

*Implementasi
Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. **Pertama**, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. **Kedua**,

keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015. Akan tetapi untuk tahun berikutnya Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun berjalan sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp66.234.500,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 66.234.500,00 atau mencapai 60,00 persen dari estimasi pendapatan. Pendapatan Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023

| Uraian | 2023 | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % Real Pend |
| Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Bada Peradilan | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Ongkos Perkara | 40.495.000,00 | 25.950.000,00 | 64,08 |
| Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya | 70.161.000,00 | 39.174.500,00 | 55,84 |
| Jumlah | 110.656.000,00 | 66.234.500,00 | 59,86 |

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.584.500,00 atau 11,04 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini karena adanya pendapatan uang muka (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan seperti leges akta cerai dan leges salinan Putusan atau Penetapan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

| URAIAN | REALISASI SEMESTER I T.A. 2023 | REALISASI SEMESTER I T.A. 2022 | NAIK (TURUN) % |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Pendapatan Uang Mukan(leges) dan Upah pada panitera Badan Peradilan | - | 700.000,00 | 00,00 |
| Pendapatan Ongkos Perkara | 40.495.000,00 | 22.040.000,00 | 83,73 |
| Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya | 70.161.000,00 | 36.910.000,00 | 90,09 |
| JUMLAH | 110.656.000,00 | 59.650.000,00 | 85,51 |

Realisasi Belanja
Negara Rp
Rp93.800.00,00

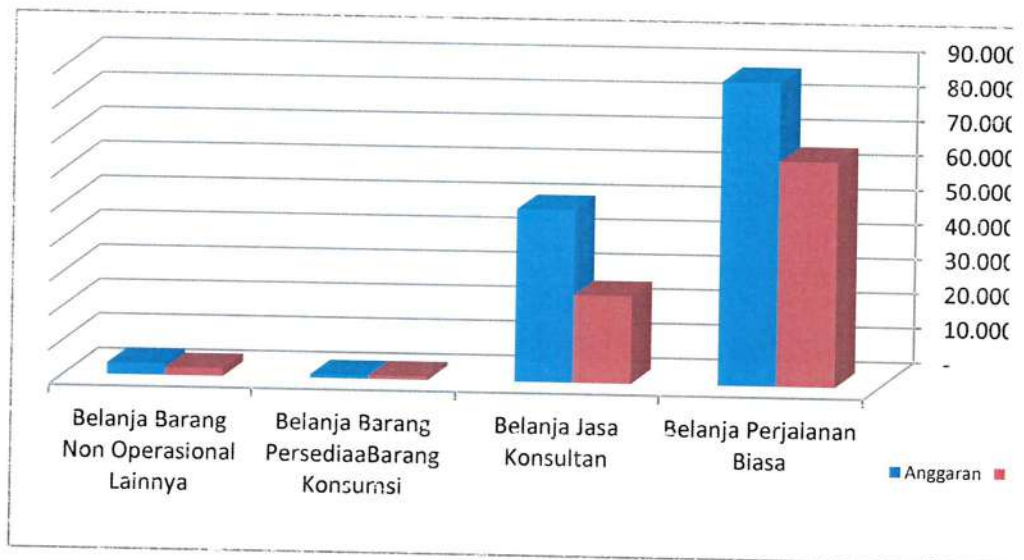
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Muara Enim pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 93.800.000,00 atau 65,91 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 142.320.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

| Uraian | 2023 | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | %Real Angg. |
| Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 3.400.000,00 | 2.250.000,00 | 66% |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100% |
| Belanja Jasa Konsultan | 50.000.000,00 | 25.400.000,00 | 51% |
| Belanja Perjalanan Biasa | 87.920.000,00 | 65.150.000,00 | 74% |
| Jumlah | 142.320.000,00 | 93.800.000,00 | 65,91 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.401.998,00 atau sebesar 21,19 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2022 pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena bertambahnya Anggaran Belanja barang di TA 2023 berupa Jasa Konsultan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

| LURAIAN | REALISASI T.A. 2023 | REALISASI T.A. 2022 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Belanja Barang | 2.250.000,00 | 2.620.000,00 | (14,12) |
| Belanja Jasa | 25.400.000,00 | 25.400.000,00 | 0,00 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 65.150.000,00 | 49.378.002,00 | 31,94 |
| Belanja Persediaan | 1.000.000,00 | - | |
| Jumlah | 93.800.000,00 | 77.398.002,00 | 21,19 |

*Belanja Barang
Rp 2.250.000,00*

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.250.000,00 dan Rp. 2.620.000,00. Realisasi belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 370.000,00 atau (14,12) persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2022 pada periode yang sama.

*Belanja Jasa
Rp 25.400.000,00*

B.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.400.000,00 dan Rp 25.400.000,00. Realisasi belanja Barang TA 2023 memiliki nilai yang sama dibandingkan realisasi belanja barang TA 2022 pada periode yang sama.

*Belanja Perjalanan
Dalam negeri
Rp. 65.150.000,00*

B.5 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 65.150.000,00 dan Rp. 49.378.002,00. Realisasi belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.771.998,00 atau 31,94 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2022 pada periode yang sama.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca
Rp.106.346.175,0
0

Pengadilan Agama Muara Enim pada laporan keuangan BA 005.04 TA 2023 memiliki akun untuk disajikan ke dalam Neraca per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing berupa nilai persediaan sebesar Rp.106.346.175,00 dan Rp. 4.732.900,00.

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp7.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

| URAIAN | 30 Juni 2023 | 31 Desember 2022 |
|------------------|---------------------|------------------|
| Uang Tunai | 7.000.000,00 | 0,00 |
| Kuitansi UP /TUP | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 7.000.000,00 | 0,00 |

C.2 Persediaan

Persediaan
Rp.7.494.775,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 7.494.775,00 dan Rp.4.732.900,00 . Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

| URAIAN | 30 Juni 2023 | 31 Desember 2022 |
|------------------|--------------|------------------|
| Barang Konsumsi: | 7.494.775,00 | 4.732.900,00 |
| Jumlah | 7.494.775,00 | 4.732.900,00 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai yang disajikan dalam neraca adalah merupakan nilai setelah dilakukan cek fisik persediaan (*stock opname*).

Uang muka dari KPPN
Rp91.851.400,00

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp91.851.400,00 dan Ro0,00 (nihil). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai uang tunai di tangan Bendahara Penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengadilan atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Uang muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas
Rp.4.732.900,00

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.732.900,00 dan 3.112.800,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp66.234.500,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya-LO sebesar Rp. 66.234.500,00 dan Rp. 59.650.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

| URAIAN | T.A. 2023 | T.A. 2022 | NAIK (TURUN) % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada Badan Peradilan | 1.110.000,00 | 700.000,00 | 100,00 |
| Pendapatan Ongkos Perkara | 25.950.000,00 | 22.040.000,00 | 17,74 |
| Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya | 39.174.500,00 | 36.910.000,00 | 6,14 |
| Jumlah | 66.234.500,00 | 59.650.000,00 | 11,04 |

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.1.907.900,00 dan Rp.2.556.400,00. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Rincian Beban persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

| URAIAN | T.A. 2023 | T.A. 2022 | NAIK (TURUN) % |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Beban Persediaan | 1.907.900,00 | 2.556.400,00 | (25,37) |
| Jumlah | 1.907.900,00 | 2.556.400,00 | (25,37) |

Beban Barang & Jasa
Rp. 27.650.000,00

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.27.650.000,00 dan Rp.27.020.000,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

| URAIAN | T.A. 2023 | T.A. 2022 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Barang dan Jasa | 27.650.000,00 | 27.020.000,00 | 2,33 |
| Jumlah | 27.650.000,00 | 27.020.000,00 | 2,33 |

Beban Perjalanan Dinas Rp
65.150.000,00

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp.65.150.000,00 dan Rp. 52.314.002,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan pemanggilan reelas dan pemberitahuan dari Jurusita atau Jurusita Pengganti, pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) dan Isbat Terpadu.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

| URAIAN | T.A. 2023 | 2022 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 65.150.000,00 | 52.314.002,00 | 0,25 |
| Jumlah | 65.150.000,00 | 52.314.002,00 | 0,25 |

Surplus / (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,00

D.4 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

| URAIAN | TA 2023 | TA 2022 | NAIK (TURUN) % |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| Surplus/ (Defisit) Kegiatan Non Operasional | - | - | 0 |
| - Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus/ (Defisit) sebelum pos luar biasa | (28.473.400) | (22.240.402) | 28% |
| Pos Luar Biasa | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit LO | (28.473.400) | (22.240.402) | 28% |

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
4.732.900,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing adalah Rp. 4.732.900,00 dan Rp. 3.112.800,00

Defisit - LO
(Rp.28.473.400,00)

E.2 Surplus/ (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar (Rp.28.473.400,00) dan (Rp. 22.240.402,00). Surplus-LO merupakan selisih lebih antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar
Entitas*
Rp.31.235.275,00

E.3 Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp31.235.275,00 dan Rp.17.748.002,00. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara Realisasi Belanja netto (setelah dikurangi pengembalian belanja), Realisasi Pendapatan netto (setelah dikurangi pengembalian pendapatan) dan transaksi lainnya yang terkait dengan entitas lain.

Ekuitas Akhir Rp
7.494.775,00

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 7.494.775,00 dan (Rp. 1.379.600,00)

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Pengungkapan

Lainnya

Sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan TA 2023, Pengadilan Agama Muara Enim belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), sehingga tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut terhadap temuan BPK.

F.2 Rekening Pemerintah

Selama Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Muara Enim hanya memiliki 1 (satu) rekening yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran BA 005.04 yaitu berupa Rekening Giro Nomor 8100124022831000 a.n. BPg 144 PA Muara Enim (04) di Bank Mandiri Cabang Muara Enim dengan saldo per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0,00 (nihil).

F.3 Pengelolaan Dana Pihak Ke-3

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, bahwa seluruh biaya proses dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI (*off balance sheet*). Saldo per 30 Juni 2023 sebesar Rp 122.250.600,00 Sedangkan Saldo per 30 Juni 2022 sebesar Rp. Rp.159.506.000,00 . Rincian biaya proses penyelesaian perkara dimaksud, sebagai berikut :

Rincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara TA 2023

| Biaya Perkara | Biaya Eksekusi | Biaya Konsinyasi | Biaya Lelit-Gain | Jumlah |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 122.250.000,00 | - | - | - | 122.250.000,00 |

Penjelasan mengenai biaya proses penyelesaian diatas antara lain :

a. Biaya Perkara

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara yaitu pihak yang mengajukan gugatan/permohonan sebagai uang muka (panjar) biaya penanganan/penyelesaian perkara mereka di Pengadilan Agama. Pada

dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena Penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar, maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Regiemen, Staatsblad* tahun 1941 no 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*) *Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012, tanggal 10 April 2012. Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari : Biaya panggilan, Biaya sita, Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara seperti penggandaan dokumen, penjilidan, dll serta Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara.

b. Biaya Eksekusi

Merupakan uang muka/panjar untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan Pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Konsinyasi

Uang konsinyasi adalah dana yang dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar, karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran tidak mau menerima

d. Titipan dari Kepaniteraan Pidana.

Uang ini terdiri dari :

- Uang jaminan penanguhan penahanan.
- Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana.

e. Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI).

F.4 Revisi DIPA

Total pagu anggaran yang dikelola oleh Pengadilan agama Muara Enim pada DIPA BA 005.04 TA 2023 adalah sebesar Rp. 142.320.000,00
Selama Semester I TA 2023, DIPA BA 005.04 mengalami 2 (dua) kali revisi Dipa yaitu tanggal 13 Februari 2023 dan 11 April 2023 Revisi hanya dilakukan pada Halaman III DIPA, yakni rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

LAMPIRAN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 402283
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-06**

| No | Jenis Rekon | Nilai SPAN | Nilai SAKTI | Selisih |
|----|--|-------------|-------------|---------|
| 1 | Pagu Belanja | 142,320,000 | 142,320,000 | 0 |
| 2 | Belanja | 93,800,000 | 93,800,000 | 0 |
| 3 | Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estimasi Pendapatan | 110,656,000 | 110,656,000 | 0 |
| 5 | Pendapatan Bukan Pajak | 66,234,500 | 66,234,500 | 0 |
| 6 | Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pengembalian Pajak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mutasi Uang Persediaan | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 9 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 10 | Kas pada Badan Layanan Umum | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kas Lainnya di K/L dari Hibah | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga | 0 | 0 | 0 |

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 03-JUL-23



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 31/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 31/07/23 9:35 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | 2023 | 2022 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0.00 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 91,851,400 | 0 | 91,851,400 | 0.00 |
| Persediaan | 7,494,775 | 4,732,900 | 2,761,875 | 58.35 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 106,346,175 | 4,732,900 | 101,613,275 | 2,146.96 |
| JUMLAH ASET | 106,346,175 | 4,732,900 | 101,613,275 | 2,146.96 |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 91,851,400 | 0 | 91,851,400 | 0.00 |
| Uang Muka dari KPPN | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 98,851,400 | 0 | 98,851,400 | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 98,851,400 | 0 | 98,851,400 | |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 7,494,775 | 4,732,900 | 2,761,875 | 58.35 |
| JUMLAH EKUITAS | 7,494,775 | 4,732,900 | 2,761,875 | 58.35 |
| JUMLAH EKUITAS | 7,494,775 | 4,732,900 | 2,761,875 | 58.35 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 106,346,175 | 4,732,900 | 101,613,275 | 2,146.96 |

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Muara Enim, 31 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris/KPA



HENDRI SURYANA
197405312001121002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 31/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 31/07/23 9:33 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

| URAIAN | 2023 | 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|------------|------------|------------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Penghasilan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Cukai | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Masuk | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Keluar | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 66,234,500 | 59,650,000 | 6,584,500 | 11.039 |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 66,234,500 | 59,650,000 | 6,584,500 | 11.039 |
| PENDAPATAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan | 66,234,500 | 59,650,000 | 6,584,500 | 11.039 |
| BEBAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pegawai | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Persediaan | 1,907,900 | 2,556,400 | (648,500) | (25.368) |
| Beban Barang dan Jasa | 27,650,000 | 27,020,000 | 630,000 | 2.332 |
| Beban Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Perjalanan Dinas | 65,150,000 | 52,314,002 | 12,835,998 | 24.536 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bunga | 0 | 0 | 0 | |

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 31/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 31/07/23 9:33 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

| URAIAN | 2023 | 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Beban Subsidi | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Transfer | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH BEBAN | 94,707,900 | 81,890,402 | 12,817,498 | 15.652 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (28,473,400) | (22,240,402) | (6,232,998) | 28.026 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (28,473,400) | (22,240,402) | (6,232,998) | 28.026 |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | (28,473,400) | (22,240,402) | (6,232,998) | 28.026 |

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Muara Enim, 31 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris/KPA



HENDRI SURYANA
197405812001121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (402283) PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl Data : 31/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 31/07/23 9:34 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

| URAIAN | 2023 | 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|--|--------------|--------------|------------------------|-----|
| EKUITAS AWAL | 4,732,900 | 3,112,800 | 1,620,100 | - |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (28,473,400) | (22,240,402) | (6,232,998) | - |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0 | 0 | 0 | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 31,235,275 | 17,748,002 | 13,487,273 | - |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | 2,761,875 | (4,492,400) | 7,254,275 | - |
| EKUITAS AKHIR | 7,494,775 | (1,379,600) | 8,874,375 | - |

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Muara Enim, 31 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris/KPA



HENDRI SURYANA

197405312001121002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM 402283

Tgl Data : 31/07/23 6:00 AM
 Tgl Cetak : 31/07/23 9:35 AM
 Halaman : 1
 lap_lra_face_satker_komparatif

| NO | URAIAN | 2023 | | | 2022 | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH | | | | | | |
| | PENERIMAAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 110,656,000 | 66,234,500 | (44,421,500) | 125,587,000 | 59,650,000 | 65,937,000 |
| | PENERIMAAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH | 110,656,000 | 66,234,500 | (44,421,500) | 125,587,000 | 59,650,000 | 65,937,000 |
| B | BELANJA | | | | | | |
| | BELANJA PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA BARANG | 142,320,000 | 93,800,000 | 48,520,000 | 179,194,000 | 77,398,002 | 101,795,998 |
| | BELANJA MODAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA SUBSIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA HIBAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dana Bagi Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM 402283

Tgl Data : 31/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 31/07/23 9:35 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_salker_komparatif



| NO | URAIAN | 2023 | | | | 2022 | | | |
|----------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dana Alokasi Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dana Alokasi Khusus Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dana Otonomi Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dana Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH BELANJA (B I + B II) | 142,320,000 | 93,800,000 | 48,520,000 | 66 | 179,194,000 | 77,398,002 | 101,795,998 | 66 |
| C | PEMBIAYAAN | | | | 0 | | | | 0 |

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Muara Enim, 31 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris/KPA



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 402283
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
SUMATERA SELATAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 31/07/23 9:36 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 31/7/23 6:45 AM

| KODE | URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN SETELAH REVISI | REALISASI BELANJA | | | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
|--------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | BELANJA | PENGEMBALIAN BELANJA | BELANJA NETTO | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8=5/4 | 9=4-7 |
| 52 | BELANJA BARANG | | | | | | | |
| 5212 | Belanja Barang Non Operasional | | | | | | | |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 3,400,000 | 3,400,000 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 66.18 | 1,150,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 | 3,400,000 | 3,400,000 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 66.18 | 1,150,000 |
| 5218 | Belanja Barang Persediaan | | | | | | | |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 100 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 100 | 0 |
| 5221 | Belanja Jasa | | | | | | | |
| 522131 | Belanja Jasa Konsultian | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,400,000 | 0 | 25,400,000 | 50.8 | 24,600,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 | 50,000,000 | 50,000,000 | 25,400,000 | 0 | 25,400,000 | 50.8 | 24,600,000 |
| 5241 | Belanja Perjalanan Dalam Negeri | | | | | | | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 87,920,000 | 87,920,000 | 65,150,000 | 0 | 65,150,000 | 74.1 | 22,770,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 | 87,920,000 | 87,920,000 | 65,150,000 | 0 | 65,150,000 | 74.1 | 22,770,000 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 | 142,320,000 | 142,320,000 | 93,800,000 | 0 | 93,800,000 | 65.91 | 48,520,000 |
| | JUMLAH BELANJA | 142,320,000 | 142,320,000 | 93,800,000 | 0 | 93,800,000 | 65.91 | 48,520,000 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 402283

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
SUMATERA SELATAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 31/07/23 9:37 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_pen_akun_satker

| KODE | URAIAN | ESTIMASI PENDAPATAN | REALISASI PENDAPATAN | | | % REALISASI PENDAPATAN |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | PENDAPATAN | PENGEMBALIAN PENDAPATAN | PENDAPATAN NETTO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7=6/3 |
| 42 | PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | | | | | |
| 4252 | Pendapatan Administrasi Dan Pengsakan Hukum | 0 | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 | 0 |
| 425232 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 40,495,000 | 25,950,000 | 0 | 25,950,000 | 64.08 |
| 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 70,161,000 | 39,174,500 | 0 | 39,174,500 | 55.84 |
| 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | | | | | |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252 | 110,656,000 | 66,234,500 | 0 | 66,234,500 | 59.86 |
| | JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 | 110,656,000 | 66,234,500 | 0 | 66,234,500 | 59.86 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 110,656,000 | 66,234,500 | 0 | 66,234,500 | 59.86 |



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Telp. 0734-7420107 Fax. 0734-7420108

Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

www.pa-muaraenim.go.id e-mail : pa.muaraenim@gmail.com

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL ANTARA UAKPA DAN UAKPB
BAGIAN ANGGARAN 005.01.1100.098938 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR : W6-A5/ 1247 /KU.01/VI/2023**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pengadilan Agama Muara Enim, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I.
NIP : 198010072011012005
Jabatan : Operator Persediaan/Aset

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Agama MuaraEnim, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama;**

- II. Nama : Ary Puspita Yudha, S.T.
NIP : 198709142015032002
Jabatan : Operator GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Pengadilan Agama Muara Enim, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua;**

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Internal antara UAKPA dengan UAKPB pada lingkup internal Pengadilan Agama Muara Enim dengan cara membandingkan data BMN Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 30 Juni 2023 secara bersama-sama, yang hasil dituangkan dalam Berita Acara Internal sebagai berikut:

| NO | URAIAN | UAKPA | UAKPB | PERBEDAAN |
|-----|--|------------------|------------------|-----------|
| 1. | Persediaan | 7,494,775 | 7,494,775 | - |
| 2. | Tanah | 0 | 0 | - |
| 3. | Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | - |
| 4. | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | - |
| 5. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | - |
| 6. | Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | - |
| 7. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 | 0 | - |
| 8. | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | - |
| 9. | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | - |
| 10. | Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | - |
| 11. | Aset Lain-Lain | 0 | 0 | - |
| | Akumulasi Penyusutan | 0 | 0 | - |
| | TOTAL | 7,494,775 | 7,494,775 | - |

(*SESUAIKAN DENGAN LAPORAN NERACA)



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Telp. 0734-7420107 Fax. 0734-7420108

Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

www.pa-muaraenim.go.id e-mail : pa.muaraenim@gmail.com

Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Internal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 30 Juni 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Operator GLP

AryPuspitaYudha, S.T.

NIP. 198709142015032002

PIHAK PERTAMA

Operator Persediaan/Aset

RahmiOktaria, S.H.I.

NIP.198010072011012005

Mengetahui,

Sekretaris

Hendri Suryana, S.Ag.

NIP. 197405312001121002



BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : W6-A5/ 1248/KU.01/VI/2023

Nama Satker : Pengadilan Agama Muara Enim
Kode Satker : 402283
UAPPB-W : 11.00
UAPPB-E1 : 005.04

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Muara Enim, kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia *opname fisik* Persediaan :

Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I.
NIP : 198010072011012005
Jabatan : Operator Persediaan / Kasub Bag Umum dan Keuangan

Menyatakan bahwa telah melakukan *opname fisik* persediaan Semester I Tahun 2023 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil *Opname Fisik*.

Demikian Berita Acara *Opname Fisik* Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (*Opname Fisik*)

Rahmi Oktaria, S.H.I.

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Muara Enim



Hendri Suryana, S.Ag.
NIP. 197405312001121002

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Agama Muara Enim

Kode Satker : 402283

UAPPB-W : 11.00

UAPPB-E1 : 005.04

| No | Nama Barang | Kode Barang | Kuantitas Barang | | Selisih | Kondisi | | |
|----|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|---------|-------|-------|
| | | | Laporan Persediaan | Hasil Cek Fisik | | Baik | Usang | Rusak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Blanko Akta Cerai | 1010399999002 | 50 | 50 | - | Baik | - | - |


Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan
(Opname Fisik)

Rahmi Oktaria, S.H.I.

()

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Muara Enim




Hendri Suryana, S.Ag.
NIP. 197405312001121002

**DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PERIODE 30 JUNI 2023**

| NO | SATUAN KERJA | K/L | BA-ES1 | JENIS REK | NOMOR REKENING | NAMA REKENING | BANK | NOMOR SURAT IJIN | TANGGAL IJIN REKENING | STATUS TNP/BELUM TNP | SALDO REKENING KORAN |
|----|-----------------------------|-----|--------|-----------|----------------|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM | 005 | 4 | GIRO | 7762688070 | RPL 144 PA MUARA ENIM UTK PDT BIAYA PERKARA | Bank Sberit'ah Indonesia KCP Muara Enim | S-558/WPB.07/KP.03/2021 | 26/07/2021 | TNP | 91.851.400,00 |

Muara Enim, 30 Juni 2023
Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim



Hendri Suryana, S.Ag.
NIP. 197405312001121002

**DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PERIODE 30 JUNI 2023**

| NO | SATUAN KERJA | K/L | BA-ES1 | JENIS REK | NOMOR REKENING | NAMA REKENING | BANK | NOMOR SURAT IJIN | TANGGAL IJIN REKENING | STATUS TNP/BELUM TNP | SALDO REKENING KORAN |
|----|-----------------------------|-----|--------|-----------|----------------|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM | 005 | 4 | GIRO | 7762688070 | RPL 144 PA MUARA ENIM UTK PDT BIAYA PERKARA | Bank Syaria'ah Indonesia KCP Muara Enim | S-558/WPB.07/KP.03/2021 | 26/07/2021 | TNP | 91.851.400,00 |

Muara Enim, 30 Juni 2023
Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim



Hendri Suryana, S.Ag.
NIP. 197405312001121002

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PERIODE 30 JUNI 2023

| NO | SATUAN KERJA | K/L | BA-ES1 | JENIS REK | NOMOR REKENING | NAMA REKENING | BANK | NOMOR SURAT IJIN | TANGGAL IJIN REKENING | STATUS TNP/ BELUM TNP | SALDO REKENING KORAN |
|----|-----------------------------|-----|--------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Pengadilan Agama Muara Enim | 005 | 01 | Rekening Virtual | 653244022821000 | BPg 144 PA MUARA ENIM (01) | BRI Cabang Muara Enim | S-2732/WPB.12/KP.06/2020 | 16/10/2020 | TNP | NIHIL |
| 2 | Pengadilan Agama Muara Enim | 005 | 04 | Rekening Virtual | 8100124022831000 | BPg 144 PA MUARA ENIM (04) | Bank Mandiri Cabang Muara Enim | S-1622/WPB.12/KP.06/2020 | 18/06/2020 | TNP | NIHIL |

Muara Enim, 30 Juni 2023
 Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim



Hertoko Suryana, S.Ag.
 NIP. 197405312001121002

**DAFTAR REKENING PERKARA DAN REKENING PERKARA LAINNYA SATUAN KERJA PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PERIODE 30 JUNI 2023**

| NO | SATUAN KERJA | K/L | BA-ES1 | JENIS REK | NOMOR REKENING | NAMA REKENING | BANK | NOMOR SURAT IJIN | TANGGAL IJIN REKENING | STATUS TNP/BELUM TNP | SALDO REKENING KORAN |
|----|-----------------------------|-----|--------|-----------|----------------|--|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM | 005 | 4 | GIRO | 7762688070 | RPL 144 PA MUARA ENIM UTK PDT BIAYA PERKARA | Bank Syaria'ah Indonesia KCP Muara Enim | S-558/WPB.07/KP.03/2021 | 26/07/2021 | TNP | 91.851.400,00 |

Muara Enim, 30 Juni 2023

Perkatis Pengadilan Agama Muara Enim



Handi Suryana, S.Ag
NIP. 38740531 200112 1 002

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2023

Kode dan Nama UAKPA : (402283.) Pengadilan Agama Muara Enim
 Kode dan Nama UAPPAW : (1100) Pengadilan Tinggi Agama Palembang
 Kode dan Nama Eselon 1 : (04) Badan Peradilan Agama
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung

| Objek Penelaahan | | Kondisi LK | | Seharusnya |
|---|--|-------------|--------------|-------------------|
| <i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i> | | | | |
| <i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i> | | | | |
| KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN | | | | |
| | Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Pernyataan Tanggung Jawab | √ | | Ada |
| 2 | Face LRA, Neraca, LO dan LPE | √ | | Ada |
| 3 | Catatan atas Laporan Keuangan | √ | | Ada |
| | Laporan Keuangan Tambahan | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal | √ | | Ada |
| 2 | Neraca Percobaan Akrual | √ | | Ada |
| 3 | Neraca Percobaan Kas | √ | | Ada |
| 4 | Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun | √ | | Ada |
| KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI | | | | |
| | Kesesuaian Saldo | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI | sama | | Sama |
| <i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i> | | | | |
| KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI | | | | |
| | Persamaan Dasar Akuntansi | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE | Sama | | Sama |
| 2 | Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca | Sama | | Sama |
| 3 | Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas | Sama | | Sama |
| PENGECEKAN PADA MONSAKTI | | | | |
| | To Do List | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan | | Tidak | Tidak |
| 2 | Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali) | Ya | | Ya |
| 3 | Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan | | Tidak | Tidak |
| 4 | Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan | | Tidak | Tidak |
| 5 | Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) | | Tidak | Tidak |
| 6 | Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan | | Tidak | Tidak |
| 7 | Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan | | Tidak | Tidak |
| 8 | Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan | | Tidak | Tidak |
| 9 | Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah) | | Tidak | Tidak |
| 10 | Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang | | Tidak | Tidak |
| 11 | Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan | | Tidak | Tidak |
| 12 | Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan | | Tidak | Tidak |
| <i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i> | | | | |
| | | | | |
| | Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi) | Ada | Tidak | Seharusnya |

| | | | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------|
| 1 | Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA? | | Tidak | Tidak |
| 2 | Adakah "TDK COA" yang BEDA? | | Tidak | Tidak |
| 3 | Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA? | | Tidak | Tidak |
| | a. Pagu/DIPA | | Tidak | Tidak |
| | b. Estimasi PNBPN | | Tidak | Tidak |
| | c. Belanja | | Tidak | Tidak |
| | d. Pengembangan Belanja | | Tidak | Tidak |
| | e. Pendapatan | | Tidak | Tidak |
| | f. Pengembangan Belanja | | Tidak | Tidak |
| | g. Kas BLU | | Tidak | Tidak |
| | h. Kas di Bendahara Pengeluaran | | Tidak | Tidak |
| | i. Kas Hibah | | Tidak | Tidak |
| | j. Pengesahan Hibah Langsung | | Tidak | Tidak |
| | | | | |
| | Rekon Internal | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat Selisih Rekon Internal | | Tidak | Tidak |
| | | | | |
| | Daftar MONSAKTI | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah) | | Tidak | Ada/Tidak |
| 2 | Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister) | | Tidak | Ada/Tidak |
| 3 | Adakah Neraca Tidak Balance? | | Tidak | Tidak |
| 4 | Adakah Pagu Minus (Basis SP2D) | | Tidak | Tidak |
| 5 | Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi? | | Tidak | Tidak |
| 6 | Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada) | | Tidak | Tidak |
| PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL | | | | |
| | Pengecekan Saldo Neraca Percobaan | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akruai | | Tidak | Tidak |
| 2 | Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas | | Tidak | Tidak |
| 3 | Terdapat Saldo bernilai desimal | | Tidak | Tidak |
| | | | | |
| | Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi) | Ya | | Ya |
| 2 | Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K) | Ya | | Ya |
| 3 | Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K) | Ya | | Ya |
| 4 | Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) | Ya | | Ya |
| 5 | Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D) | Ya | | Ya |
| 6 | Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu) | Ya | | Ya |
| 7 | Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K) | Ya | | Ya |
| | | | | |
| | Akun-Akun yang tidak boleh ada | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) | | Tidak | Ada/Tidak |
| 2 | Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN) | | Tidak | Tidak |
| 3 | Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid) | | Tidak | Tidak |
| 4 | Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain | | Tidak | Tidak |
| 5 | Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga" | | Tidak | Tidak |
| 6 | Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Uang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar | | Tidak | Tidak |
| 7 | Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan) | | Tidak | Tidak |
| 8 | Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah) | | Tidak | Tidak |
| 9 | Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN | | Tidak | Tidak |
| 10 | Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998) | | Tidak | Tidak |

| | | | | |
|----|--|-----|-------|------------|
| 11 | Terdapat akun 425914/5/6/3/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain-Lain/Transfer TAYL) | | Tidak | Tidak |
| 12 | Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain) | | Tidak | Tidak |
| 13 | Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC) | | Tidak | Tidak |
| | Jika Bukan Satker BLU | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU" | | Tidak | Tidak |
| 2 | Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU) | | Tidak | Tidak |
| 3 | Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU) | | Tidak | Tidak |
| 4 | Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU) | | Tidak | Tidak |
| | Terkait Satker BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) | | Tidak | Ada/Tidak |
| | Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah | | | |
| 2 | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal) | | Tidak | Tidak |
| | Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial | | Tidak | Tidak |
| 2 | Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI | | Tidak | Tidak |
| | Hibah Langsung | Ada | Tidak | Seharusnya |
| | Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya | | Tidak | Ada/Tidak |
| 1 | Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan. | | Tidak | Ada/Tidak |
| 2 | Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal) | | Tidak | Ada/Tidak |
| 3 | Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 351133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL) | | | Ya |
| 4 | Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan? | | | Ya |
| 5 | Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ? | | | Ya |
| | Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya | | | Ada/Tidak |
| 1 | Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang | | | Ya |
| | Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI | | Tidak | Tidak |
| 2 | Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan) | | Tidak | Tidak |
| 3 | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal) | | Tidak | Tidak |
| | Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas? | | tidak | Ya/Tidak |
| 2 | Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap? | | | Ya/Tidak |

| | | | | |
|---|---|----|-------|------------|
| 3 | Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP AkruaI? | | | Ya |
| | Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) | | tidak | Ya/Tidak |
| 2 | Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal? | | | Ya/Tidak |
| | Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK | | | |
| | Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah | | tidak | Ya/Tidak |
| PENGECEKAN NERACA | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos Neraca | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya | | Ya | Ya |
| 2 | Saldo pada neraca bernilai wajar | | Ya | Ya |
| 3 | Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN | | Ya | Ya |
| 4 | Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening | | Ya | Ya |
| 5 | Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito | | Ya | Ya |
| 6 | Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar? | | Tidak | Tidak |
| 7 | Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan? | | Ya | Ya |
| 8 | Terdapat saldo bernilai desimal | | Tidak | Tidak |
| PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos LO | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015) | | Tidak | Tidak |
| 2 | Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) . atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN | | Tidak | Tidak |
| 3 | Terdapat kodifikasi atau uraian akun null | | Tidak | Tidak |
| 4 | Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang | ya | | Ya |
| 5 | Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan? | | tidak | Ya/Tidak |
| 6 | Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar | ya | | Ya/Tidak |
| 7 | Apakah terdapat saldo bernilai desimal? | | tidak | Tidak |
| PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos LPE | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir" | ya | | Ya |
| 2 | Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya | | tidak | Ya/Tidak |
| 3 | Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP | | Tidak | Tidak |
| 4 | Apakah terdapat saldo bernilai desimal? | | Tidak | Tidak |
| | Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? | Ya | | Ya |
| | Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kualitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST | | | |
| 2 | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141) | Ya | | Ya |
| PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P) | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos LRA/B/P | Ya | Tidak | Seharusnya |

| | | | | |
|---|---|----|-------|----------|
| 1 | Terdapat saldo negatif di LRAB | | Tidak | Tidak |
| 2 | Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu) | | Tidak | Tidak |
| 3 | Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya | | Tidak | Tidak |
| 4 | Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada" | | Tidak | Tidak |
| 5 | Apakah terdapat saldo bernilai desimal? | | Tidak | Tidak |
| 6 | Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi) | ya | | Ya/Tidak |
| 7 | Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti | Ya | | Ya |

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

| | Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK" | Ya | Tidak | Seharusnya |
|---|---|----|-------|------------|
| 1 | Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : | | Tidak | Ya/Tidak |
| | - Penyisihan Piutang/ Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) | | Tidak | Ya/Tidak |
| | - Beban Penyisihan Piutang (di LO) | | Tidak | Ya/Tidak |
| | - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang | | Tidak | Ya/Tidak |
| 2 | Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : | | Tidak | Ya/Tidak |
| | - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang | | Tidak | Ya/Tidak |
| 3 | Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : | Ya | | Ya/Tidak |
| | - Beban Persediaan (di LO) | Ya | | Ya/Tidak |
| 4 | Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : | Ya | | Ya/Tidak |
| | - Akumulasi AT/AL (Neraca) | Ya | | Ya/Tidak |
| | - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) | Ya | | Ya/Tidak |
| 5 | Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? | | tidak | Ya/Tidak |
| | Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO? | | | Ya |
| | | | | |
| | Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? | | tidak | Ya/Tidak |
| | Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas | | | Ya |
| 2 | Apakah ada Beban Bansos ? | | tidak | Ya/Tidak |
| | Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas | | | Ya |
| | | | | |
| | Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua | | tidak | Ya/Tidak |
| 2 | Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) | ya | | Ya/Tidak |
| | - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua | | tidak | Ya/Tidak |
| 3 | Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua | | tidak | Ya/Tidak |
| 4 | Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) | Ya | | Ya/Tidak |
| | - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua | Ya | | Ya/Tidak |
| 5 | Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua | Ya | | Ya/Tidak |

TELAAH LK BLU

| | LPSAL BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
|---|---|----|-------|------------|
| 1 | Apakah nilai LPSAL sudah sesuai? | Ya | | Ya |
| 2 | Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus? | | Tidak | Tidak |
| 3 | Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai? | Ya | | Ya |
| 4 | Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun | Ya | | Ya |
| 5 | Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA | Ya | | Ya |
| 6 | Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ? | Ya | | Ya |
| | | | | |
| | LAK BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU? | Ya | | Ya |
| 2 | Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK? | Ya | | Ya |
| 3 | Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca | Ya | | Ya |
| 4 | Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU | Ya | | Ya |
| 5 | Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca | Ya | | Ya |
| 6 | Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca | Ya | | Ya |

| | | | | |
|---|--|----|--|----|
| 7 | Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU | Ya | | Ya |
|---|--|----|--|----|

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Pjabat Penyusun LKKL,

(Hendri Suryana, S.Ag)
NIP197405312001121002

Muara Enim, 30 Juni 2023
Penelaah,

(Rahmi Oktaria, S.H.I)
NIP 198010072011012005



**MONITORING PEMBUKAAN REKENING BANK PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 30 JUNI 2023**

| No. | Satuan Kerja | K/L | BA-ES1 | Jenis Rekening | Nomor Rekening | Nama Rekening | Bank/Kantor Pos | Nomor Surat Penutupan | Status TNP | Saldo Akhir per 30 Sept 2022 (Rp.) |
|-----|--------------|-----|--------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | ~ NIHIL ~ | | | | |

Muara Enim, 30 Juni 2023
Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim



 Hendi Suryana, S.Ag.
 NIP. 197405312001121002

**MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 30 JUNI 2023**

| No. | Satuan kerja | K/L | BA-ES1 | Jenis Rekening | Nomor Rekening | Nama Rekening | Bank/Kantor Pos | Nomor Surat Penutupan | Status TNP | Saldo Akhir per 30 Sept 2022 (Rp.) |
|-----|--------------|-----|--------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | | ~ NIHIL ~ | | | | |

Muara Enim, 30 Juni 2023
Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim



Rehini Suryana, S.Ag.
NIP. 197405312001121002